

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERIAN MODAL USAHA

Andi Tenri Ulmi Qalsum^{*1}, Rajamemang², Wahyudi Putera³, Wahyuti⁴,
Nisma Iriani⁵, Saripuddin⁶

^{1,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, Makassar, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, Indonesia


³Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

⁴Universitas Cendrawasih, Jayapura, Indonesia

⁵Universitas Indonesia Timur, Makassar, Indonesia

⁶Universitas Patompo, Makassar, Indonesia

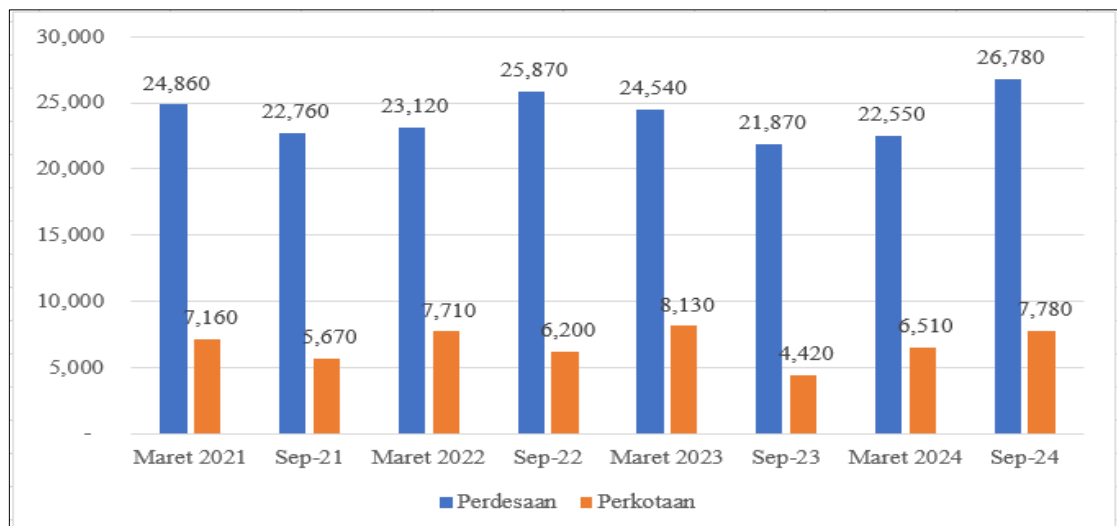
*Corresponding Author: Atten999@Gmail.Com

<p>Info Article</p> <p>Received : 11 April 2025</p> <p>Revised : 09 Mei 2025</p> <p>Accepted : 14 Juni 2025</p> <p>Publication : 30 Juni 2025</p>	<p>Abstract. <i>This study aims to examine the implementation of the policy of providing business capital through BUMDes as an effort to empower the community's economy in Era Baru Village, Tellulimpo District. Using a qualitative method with purposive sampling technique, data was collected through observation, interviews, and documentation. The results showed that the program succeeded in increasing community income through the management of various village businesses. In addition to providing economic impact, the program also encourages financial transparency and business sustainability. The findings provide new insights into effective BUMDes management and provide practical recommendations for the development of an empowerment model that can be replicated in other villages, with an emphasis on improving the capacity of managers as well as active community participation.</i></p>
<p>Keywords: Policy Implementation, Community Empowerment and Business Capital</p> <p>Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Masyatrakat dan Modal Usaha</p>	<p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan pemberian modal usaha melalui BUMDes sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpo. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan berbagai usaha desa. Selain memberikan dampak ekonomi, program ini juga mendorong transparansi keuangan dan keberlanjutan usaha. Temuan ini memberi wawasan baru tentang pengelolaan BUMDes yang efektif dan memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan model pemberdayaan yang bisa direplikasi di desa lain, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas pengelola serta partisipasi aktif masyarakat.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang mengalami keterbatasan akibat faktor internal (seperti kurangnya keterampilan) maupun eksternal (seperti ketimpangan struktural). Tujuannya adalah menciptakan tatanan hidup yang lebih adil, sejahtera, dan mandiri, selaras dengan cita-cita pembangunan nasional (Kruahong et al., 2023). Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan model pembangunan sebelumnya yang bersifat *top-down* dan tidak berkelanjutan (Lee & Lee, 2021). Di tingkat desa, masalah seperti kemiskinan, ketimpangan akses, dan kelembagaan yang lemah masih menjadi tantangan utama, sehingga pendekatan pemberdayaan yang holistik menjadi krusial.

Pemerintah dan dunia usaha telah menjadikan pemberdayaan sebagai agenda prioritas, termasuk melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun, esensi pemberdayaan bukanlah membuat masyarakat tergantung pada bantuan (*charity*), melainkan mendorong kemandirian melalui usaha produktif (Hidayat & Putra, 2020). Salah satu strateginya adalah pemberian modal usaha, seperti yang diterapkan di Kabupaten Sinjai melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Halfa Nur Faizah, 2023). Di Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, program ini bertujuan menggerakkan ekonomi lokal, tetapi menghadapi tantangan dalam penerimaan masyarakat, akuntabilitas dana, dan keberlanjutan usaha (Tresiana & Duadji, 2023).



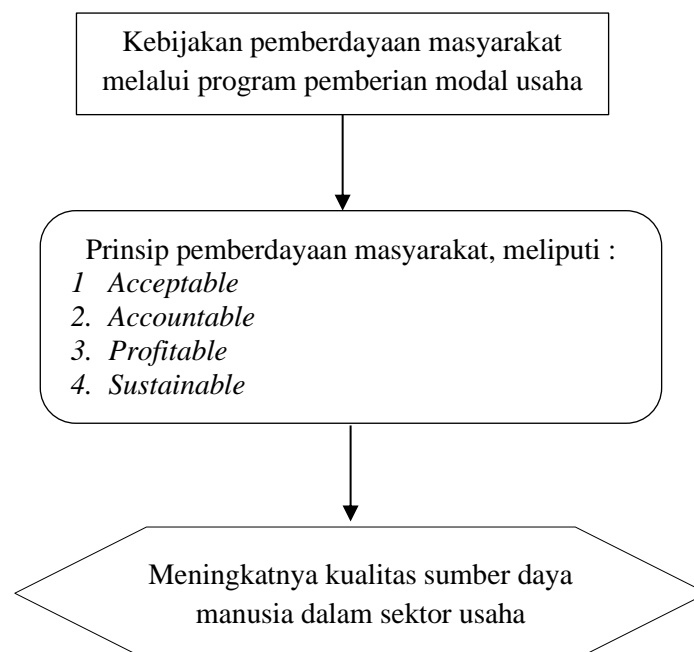
Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2025

Gambar 1. Disparitas Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2025) menunjukkan disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan. Meski kemiskinan perdesaan turun dari 24,86% (Maret 2021) menjadi 21,87% (September

2023), fluktuasi seperti lonjakan ke 26,78% (September 2024) mengindikasikan ketidakstabilan program. Hal ini mempertegas pentingnya pendekatan pemberdayaan yang berprinsip: (1) *acceptable*, (2) *accountable*, (3) *profitable*, dan (4) *sustainable* (Khair et al., 2020).

Implementasi kebijakan pemberdayaan memerlukan integrasi berbagai elemen, termasuk partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek (Babatunde et al., 2022) dan modal usaha sebagai pondasi pengembangan bisnis (Lopes & Clerc, 2023). Studi kasus seperti pemberdayaan industri tempe (Maisita et al., 2021), kemitraan CSR untuk UKM (Anis et al., 2022), dan pengelolaan desa wisata (Handayani, 2021) menunjukkan bahwa keberhasilan program bergantung pada tiga pilar: dukungan modal, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.



Sumber : *Sustainable city and community empowerment through the implementation of community-based monitoring: A conceptual approach, 2020*

Gambar 2. Bagan Kerangka Konsep (Khair et al., 2020)

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemberian modal usaha melalui BUMDes di Desa Era Baru, termasuk evaluasi efektivitas, tantangan, dan rekomendasi untuk replikasi di wilayah lain. Pendekatan konseptual Khair et al. (2020) menjadi landasan untuk memastikan program ini tidak hanya mencapai target ekonomi, tetapi juga membangun keberlanjutan dan keadilan sosial.

METHOD

Berdasarkan masalah yang diangkat maka jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Warren, 2020). “Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Waktu penelitian ini direncanakan selama 45 (empat puluh lima). Metode Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis Non probability sampling dengan teknik Purposive sampling. Menurut (Hossan et al., 2023) Non probability sampling merupakan cara pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Sedangkan teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (representatif). Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu analisis kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan verifikasi.”

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Pemberdayaan masyarakat melalui program pemberian modal usaha di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe

Pemberdayaan masyarakat melalui program pemberian modal usaha di Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan akses modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha produktif. Program ini dijalankan melalui BUMDes "Bua Tanae" dengan berbagai jenis usaha seperti simpan pinjam, pengelolaan pasar desa, bengkel, toserba, dan usaha lainnya. Melalui skema ini, masyarakat tidak hanya diberikan modal tetapi juga didorong untuk mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan adanya pembagian keuntungan yang adil dan transparan, program ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan membangun kemandirian ekonomi di desa.

***Acceptable* (Penerimaan)**

Acceptable (Penerimaan) dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan modal usaha merujuk pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.

Penerimaan ini mencakup kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, menerima manfaat, serta komitmen mereka dalam mengelola modal usaha dengan baik. Penerimaan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memahami manfaat program tetapi juga merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam mengembangkan usaha yang didukung. Hal ini menjadi indikator penting bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penerimaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui bantuan modal usaha sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe menjelaskan bahwa:

"Kebijakan ini kami rancang agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Bantuan modal usaha tidak langsung diberikan kepada individu, melainkan dikelola melalui BUMDES untuk memastikan pemanfaatannya lebih efektif dan berkelanjutan. Jenis-jenis usaha yang dipilih, seperti jasa simpan pinjam dan penyewaan mesin molen, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa". (Wawancara, 10 Januari 2025).

Dari hasil wawancara di atas sesuai dengan hasil observasi penulis dilapangan bahwa saat ini Bumdes "Bua Tanae" Desa Era Baru telah melaksanakan beberapa program kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah melalui unit jasa simpan pinjam dan unit jasa penyewaan.

Peraturan Desa Era Baru telah menetapkan beberapa jenis usaha menunjukkan adanya upaya diversifikasi ekonomi yang signifikan di tingkat desa. Jenis usaha yang sedang berjalan, seperti toserba, jasa simpan pinjam, dan usaha peternakan, mencerminkan kebutuhan dasar dan potensi ekonomi lokal yang sedang dioptimalkan. Namun, jenis usaha yang belum berjalan seperti pengelola pasar desa, usaha perdagangan, dan usaha air bersih, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau tantangan dalam pelaksanaan.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Era Baru Bapak, yang mengatakan:

"Masyarakat menyambut baik kebijakan ini karena BUMDES memberikan akses yang lebih luas dan mudah untuk mendapatkan bantuan. Kami juga memastikan bahwa masyarakat memahami dan merasa memiliki usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDES." (Wawancara, 12 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sebagaimana hasil observasi penulis bahwa saat ini terdapat 18 orang warga Desa Era baru yang telah memanfaatkan jasa simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDES "Bua Tane"

Pada dasarnya masyarakat menyambut baik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Era Baru dengan memberikan akses yang lebih mudah dan luas melalui BUMDES. Sehingga dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemahaman yang mendalam terhadap mekanisme BUMDES, masyarakat merasa lebih memiliki usaha tersebut.

Meskipun pada awalnya masyarakat merasa ragu mengenai kebijakan tersebut hal ini disampaikan oleh Kepala Dusun Bontokunyi, dalam wawancara menjelaskan bahwa:

"Pada awalnya banyak masyarakat yang meragukan program ini, tetapi setelah melihat hasil nyata dari usaha BUMDES, mereka mulai antusias. Usaha seperti simpan pinjam dan usaha peternakan memberikan dampak langsung kepada perekonomian warga." (Wawancara, 14 Januari 2025).

Meskipun pada awalnya masyarakat merasa ragu dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa era baru namun setelah melihat hasil nyata dari usaha BUMDES dan telah membuktikan manfaatnya masyarakat mulai banyak yang tertarik.

Accountable (Akuntabel)

Accountable (Akuntabel) dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui program pemberian modal usaha menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana yang diterima. Setiap penerima modal usaha diharapkan mampu mengelola dana tersebut dengan baik, melaporkan penggunaan dana secara terbuka, dan bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh. Akuntabilitas ini tidak hanya berlaku pada individu penerima, tetapi juga pada pengelola program, seperti BUMDes dan pemerintah desa, yang harus memastikan bahwa dana dialokasikan dan digunakan sesuai dengan tujuan program. Dengan akuntabilitas yang kuat, program ini dapat menciptakan kepercayaan di antara masyarakat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan memastikan bahwa dampak positif dari program dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe, menjelaskan bahwa:

"Dalam hal pengelolaan BUMDES maka salah satu yang menjadi prioritas utama kami adalah untuk memastikan akuntabilitas penggunaan modal usaha. Setiap laporan keuangan BUMDES dipaparkan secara berkala kepada masyarakat dan pemerintah desa, sehingga semua pihak dapat melihat dan mengevaluasi kinerja BUMDES. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa modal usaha yang diberikan benar-benar dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ini. (Wawancara, 10 Januari 2025).

Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDES adalah untuk memastikan modal usaha dimanfaatkan dengan baik. Setiap laporan keuangan BUMDES dipublikasikan secara berkala kepada masyarakat dan pemerintah desa. Transparansi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengevaluasi dan mengawasi kinerja BUMDES secara langsung. Dengan langkah ini, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemberdayaan melalui modal usaha semakin meningkat, karena mereka melihat bahwa dana digunakan secara bertanggung jawab. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Era Baru, yang mengatakan bahwa:

"Untuk memastikan akuntabilitas, maka BUMDES melakukan audit internal secara rutin dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah desa dan masyarakat. Langkah ini dimaksudkan agar seluruh aliran dana dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan dengan jelas. Selain itu, laporan penggunaan dana juga dibahas dalam forum desa agar masyarakat

dapat memberikan masukan dan mengetahui perkembangan usaha yang didanai”. (Wawancara, 9 Januari 2025)

BUMDES secara rutin melakukan audit internal dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah desa serta masyarakat. Laporan keuangan yang transparan dibahas dalam forum desa, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan melalui BUMDES dikelola dengan baik, sehingga masyarakat merasa yakin dan mendukung penuh kebijakan tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan yang disampaikan Kepala Dusun Bontokunyi, yang mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan BUMDES, setiap kepala dusun memiliki tanggung jawab untuk memantau dan melaporkan perkembangan usaha di wilayahnya kepada pemerintah desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap usaha yang didanai benar-benar berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari tujuan awal. Keterlibatan kepala dusun dalam pengawasan ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas yang menjamin bahwa modal usaha digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana”. (Wawancara, 14 Januari 2025).

Setiap kepala dusun bertanggung jawab untuk memantau penggunaan dana BUMDES di wilayahnya. Mereka melaporkan perkembangan usaha kepada pemerintah desa.

Profitable (Keuntungan)

Profitable (Keuntungan) dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui program pemberian modal usaha merujuk pada kemampuan program tersebut untuk menghasilkan pendapatan yang memadai bagi penerima manfaat. Keuntungan ini diharapkan tidak hanya berupa peningkatan pendapatan individu, tetapi juga kontribusi terhadap ekonomi desa secara keseluruhan. Melalui pengelolaan usaha yang baik dan tepat, modal yang diberikan dapat berkembang, menciptakan keuntungan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha, mendukung kegiatan sosial, dan memperkuat modal BUMDes. Keuntungan yang dihasilkan juga menjadi indikator keberhasilan program dalam mendidik masyarakat untuk mengelola usaha secara ekonomis dan efisien, sehingga menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe, menjelaskan bahwa:

“Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui modal usaha yang dikelola BUMDES telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Usaha-usaha yang dikembangkan, seperti toserba, penyewaan mesin molen, jasa simpan pinjam, usaha peternakan, tidak hanya memberikan keuntungan finansial yang signifikan tetapi juga mendidik masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya pengelolaan ekonomi yang baik. Keuntungan yang diperoleh oleh BUMDES digunakan kembali untuk memperkuat modal, yang secara langsung meningkatkan stabilitas ekonomi desa”. (Wawancara, 15 Januari 2025).

Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui modal usaha yang dikelola oleh BUMDES telah membawa dampak positif bagi perekonomian desa. Usaha-usaha seperti simpan pinjam tidak hanya memberikan keuntungan finansial yang substansial tetapi juga mendorong

masyarakat untuk lebih berdaya secara ekonomi. Pendapatan dari usaha ini diputar kembali untuk memperkuat modal, menciptakan siklus ekonomi yang menguntungkan dan berkelanjutan bagi seluruh warga desa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Era Baru, mengatakan:

“Modal usaha yang diberikan melalui BUMDES terbukti menguntungkan masyarakat. Usaha-usaha yang dijalankan “BUMDES, seperti toserba dan peternakan, telah memberikan pendapatan yang memadai bagi masyarakat. Keuntungan dari usaha ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah desa tetapi juga oleh masyarakat yang terlibat langsung dalam operasional usaha”. (Wawancara, 9 Januari 2025).

BUMDES telah mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan melalui berbagai unit usaha seperti toserba dan peternakan. Keuntungan ini bukan hanya dirasakan oleh pemerintah desa tetapi juga oleh masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha tersebut.

Sustainable (Berkelanjutan)

Sustainable (Berkelanjutan) dalam konteks program pemberian modal usaha mengacu pada kemampuan program untuk memberikan manfaat jangka panjang yang stabil dan terus menerus bagi masyarakat. Keberlanjutan dicapai melalui pengelolaan usaha yang efektif, di mana keuntungan yang diperoleh diinvestasikan kembali untuk pengembangan lebih lanjut dan pemeliharaan usaha. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa modal yang diberikan tidak hanya memberikan manfaat sesaat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kapasitas ekonomi desa. Dengan pendekatan ini, manfaat dari program dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe, menjelaskan bahwa :

“Program bantuan modal usaha yang dijalankan melalui BUMDES telah dirancang untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat. Usaha-usaha yang ada, seperti peternakan dan usaha simpan pinjam, tidak hanya memberikan pendapatan yang stabil, tetapi juga didesain agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat”. (Wawancara, 10 Januari 2025).

Program pemberdayaan melalui bantuan modal usaha yang dikelola oleh BUMDES didesain untuk menghasilkan manfaat jangka panjang. Usaha-usaha seperti peternakan dan simpan pinjam tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga dirancang untuk bertahan dan berkembang seiring waktu. Strategi ini bertujuan agar desa mampu membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat saat ini tetapi juga generasi mendatang. Selanjutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Era Baru Bapak Nurhadi, mengatakan:

“Salah satu tujuan utama dari program bantuan modal usaha ini adalah memastikan bahwa usaha yang dikelola oleh BUMDES dapat beroperasi secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, keuntungan yang diperoleh tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan saat ini tetapi juga diinvestasikan kembali untuk

memperkuat dan mengembangkan usaha tersebut di masa depan.”. (Wawancara, 12 Januari 2025).

Keberlanjutan menjadi fokus utama dalam program bantuan modal usaha. Dengan demikian, usaha ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Program ini memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat terus dinikmati dalam jangka panjang melalui pengelolaan yang baik dan akuntabel. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bontokunyi, menjelaskan bahwa:

“Usaha yang dikelola oleh BUMDES di Dusun Bontokunyi, seperti peternakan, dirancang untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Modal usaha yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Dengan pendekatan ini, BUMDES tidak hanya memberikan keuntungan langsung tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang”. (Wawancara, 14 Januari 2025).

Keberlanjutan program bantuan modal usaha terwujud melalui pengelolaan usaha-usaha seperti usaha peternakan dan lainnya dan. Usaha ini tidak hanya memberikan keuntungan saat ini tetapi juga berpotensi untuk terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.

Discussion

Dari hasil penelitian diatas pemberdayaan masyarakat melalui program pemberian modal usaha dengan *Acceptable* (Penerimaan) Dengan melihat dampak positif, seperti peningkatan perekonomian lokal melalui usaha simpan pinjam dan usaha peternakan, warga menjadi lebih mendukung dan terlibat aktif. Ini menandakan bahwa penerimaan kebijakan dapat meningkat seiring dengan bukti nyata keberhasilannya di lapangan. Selanjutnya *Accountable* (Akuntabel) Keterlibatan langsung kepala dusun dalam pengawasan ini memastikan bahwa modal usaha dikelola dengan baik dan sesuai dengan rencana. Pengawasan ketat ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas yang menjamin bahwa dana BUMDES digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan awal, yang mendukung kepercayaan masyarakat. Kemudian *Profitable* (Keuntungan) Masyarakat tidak hanya mendapatkan pendapatan tambahan, tetapi juga mendapat pendidikan dan pengalaman dalam mengelola usaha secara lebih ekonomis dan efisien. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan secara langsung tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang positif. Serta *Sustainable* (Berkelanjutan) Keberlanjutan ini tercapai dengan investasi kembali keuntungan ke dalam usaha, memastikan bahwa manfaat dari program ini dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat desa.”

Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pemberdayaan masyarakat melalui home industry tempe telah dilakukan dengan

baik, dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. (2) Hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui home industry tempe adalah meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga seperti tanggung jawab, kemandirian, inisiatif dan pengendalian diri. (3) faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan adalah sumber daya manusia, motivasi yang tinggi, dan adanya kebijakan pemerintah. Adapun faktor penghambatnya yaitu sikap masyarakat yang masih tradisional, keterbatasan modal dan terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saran dalam penelitian ini agar pengelola mampu memberikan bimbingan dalam memasarkan produk dan anggota mampu meningkatkan kemampuan yang diperoleh sehingga dapat membangun usaha secara mandiri. Hasil dari penelitian ini adalah proses pemberdayaan berjalan sesuai dengan indikator pemberdayaan sehingga terjadi peningkatan kemandirian ekonomi keluarga (Maisita et al., 2021). Kemudian Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan program kemitraan CSR memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya dan dilakukan melalui kemitraan berdasarkan beberapa pola bisnis. Program kemitraan CSR memiliki alokasi dana yang berasal dari laba bersih BUMN, deposito, jasa administrasi/bagi hasil/margin, bunga deposito, dan lain-lain. Sedangkan rekomendasi dari penelitian ini adalah Kementerian BUMN perlu membuat tata cara pelaksanaan program kemitraan yang memuat tahapan penyediaan dana bagi calon mitra binaan, organisasi pelaksana, dan kegiatan evaluasi (Anis et al., 2022). Serta Hasil penelitian dilihat dari tiga tahapan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu tahap penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan di Desa Wisata Cikakak belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terbukti dengan adanya hambatan-hambatan yang ditemui pada setiap tahapan pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak adalah organisasi, sumber daya manusia, dan modal usaha (Handayani, 2021); (Rajamemang et al., 2023); (Putera et al., 2021); (Putera et al., 2023).

CONCLUSION

Penelitian tentang implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program pemberian modal usaha di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek. Dari indikator penerimaan (*Acceptable*), masyarakat menunjukkan respons positif terhadap program ini, dengan penerimaan yang baik terhadap berbagai jenis usaha yang didukung melalui BUMDES. Aspek akuntabilitas (*Accountable*) juga terpenuhi, dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan pertanggungjawaban yang jelas dari

pengelola BUMDES. Keuntungan (*Profitable*) dari usaha-usaha ini sangat memadai, dengan laba bersih yang signifikan menunjukkan profitabilitas yang baik. Selain itu, program ini juga berkelanjutan (*Sustainable*), dengan hasil yang memadai untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat pengelolaan usaha di desa.”

“Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal usaha di Desa Era Baru memberikan dampak positif yang luas, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat hingga pengelolaan keuangan yang lebih baik. Keberhasilan ini menunjukkan potensi model pemberdayaan ini untuk diterapkan di desa-desa lain dengan kondisi serupa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan usaha yang baik juga mengindikasikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.”

REFERENCES

- Anis, M., Pribanus Wantara, H., & Moh Syarif, H. (2022). SERAT ACITYA-JURNAL ILMIAH UNTAG SEMARANG IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN. *Journal Ilmiah UNTAG Semarang*, 11(2).
- Babatunde, G. B., Schmidt, B., Gwelo, N. B., & Akintola, O. (2022). DEFINING, CONCEPTUALISING AND OPERATIONALISING COMMUNITY EMPOWERMENT: A SCOPING REVIEW PROTOCOL. In *BMJ Open* (Vol. 12, Issue 5). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-056152>
- Gonzalez, Á. de J., Burgos-López, L., Felix, E. R., & Nienhusser, H. K. (2021). POLICY IMPLEMENTATION AS A TOOL FOR ADVANCING EQUITY IN COMMUNITY COLLEGE. *Education Policy Analysis Archives*, 29. <https://doi.org/10.14507/epaa.29.6689>
- Halfa Nur Faizah. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA. *Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 5(1).

- Handayani, A. V. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WISATA CIKAKAK KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 3(2).
- Hidayat, D., & Putra, A. (2020). PARTICIPATIVE BASED SOCIAL ENTREPRENEURSHIP TRAINING FOR COMMUNITY EMPOWERMENT. Digital Press Social Sciences and Humanities, 6. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.46381>
- Hossan, D., Dato' Mansor, Z., & Jaharuddin, N. S. (2023). RESEARCH POPULATION AND SAMPLING IN QUANTITATIVE STUDY. International Journal of Business and Technopreneurship (IJBT), 13(3). <https://doi.org/10.58915/ijbt.v13i3.263>
- Irawan, B., Roesminingsih, M. V., Widodo, B. S., & Roesminingsih, E. (2024). THE INFLUENCE OF COMMUNICATION ON POLICY IMPLEMENTATION: THE MEDIATING ROLE OF DISPOSITION. Decision Science Letters, 13(1). <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2023.12.005>
- Khair, N. K. M., Lee, K. E., & Mokhtar, M. (2020). SUSTAINABLE CITY AND COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY-BASED MONITORING: A CONCEPTUAL APPROACH. Sustainability (Switzerland), 12(22). <https://doi.org/10.3390/su12229583>
- Kruahong, S., Tankumpuan, T., Kelly, K., Davidson, P. M., & Kuntajak, P. (2023). COMMUNITY EMPOWERMENT: A CONCEPT ANALYSIS. In Journal of Advanced Nursing (Vol. 79, Issue 8). <https://doi.org/10.1111/jan.15613>
- Lee, Y., & Lee, C. (2021). THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CORPORATE PERFORMANCE AND CAPITAL COSTS. ASIA-PACIFIC Journal of Business & Commerce, 13(1). <https://doi.org/10.35183/ajbc.2021.03.13.1.74>
- Lopes, H., & Clerc, C. (2023). POLITICAL ECONOMY OF THE FIRM: AUTHORITY, GOVERNANCE, AND ECONOMIC DEMOCRACY. IN POLITICAL ECONOMY OF THE FIRM: AUTHORITY, GOVERNANCE, AND ECONOMIC DEMOCRACY. <https://doi.org/10.4324/9781003247241>
- Maisita, S., Haila, H., & Siregar, H. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI HOME INDUSTRY TEMPE DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA. Lifelong Education Journal, 1(1). <https://doi.org/10.59935/lej.v1i1.11>

- Mazzarol, T., & Reboud, S. (2020). SMALL BUSINESS MANAGEMENT: THEORY AND PRACTICE. In *Adult Education Quarterly* (Vol. 10, Issue 2).
- Popova, A. A. (2020). RECENT TRENDS IN THE IMPLEMENTATION OF TRADE AND DEVELOPMENT STRATEGIES IN DEVELOPING COUNTRIES. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Ekonomika*, 36(3). <https://doi.org/10.21638/spbu05.2020.302>
- Putera, W., Iriani, N., Julian, S. F., Nurjanna, Rahman, A., & Sucianti, R. (2023). DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY AS A DETERMINANT OF BUSINESS COMPETITIVENESS THROUGH E-COMMERCE OF MSMES PRODUCTS IN INDONESIA. *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 1(6). [https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1\(6\).79](https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1(6).79)
- Putera, W., Sahabuddin, R., Rakib, M., & Lestari, I. (2021). THE INFLUENCE OF FACILITIES AND INNOVATION IN IMPROVING CONSUMER SATISFACTION THROUGH CREATIVITY IN MSMES MICRO HANDICRAFT PRODUCTS IN SOUTH SULAWESI PROVINCE. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6).
- Rajamemang, Rusdi Maidin, A. M., Nurdin, M., Putera, W., Tenri Ulmi, A., Rasyid, A., Lestari Yahya, I., & Hidayat, H. (2023). EFFECTIVENESS OF LICENSING SERVICES FOR ISSUING BUSINESS IDENTIFICATION NUMBERS THROUGH THE OSS-RBA SYSTEM AT THE INVESTMENT AND ONE-STOP INTEGRATED SERVICE OFFICE OF SINJAI REGENCY. *The American Journal of Humanities and Social Sciences Research (THE AJHSSR)*, 6(2).
- Staudinger, U. M., & Law, A. (2023). WISDOM. In *Encyclopedia Of Mental Health, Third Edition: Volume 1-3* (Vol. 3). <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91497-0.00028-X>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2023). CAN THE POLICY ENVIRONMENT IMPROVE THE POLICY IMPLEMENTATION PRACTICE? *Public Administration Issues*, 5. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2023-0-5-69-90>
- Warren, K. (2020). QUALITATIVE DATA ANALYSIS METHODS AND TECHNIQUES. *GradCoach*.